

Republik Indonesia



RAPBN
RAPBN
RAPBN
RAPBN
RAPBN
RAPBN

ADVERTORIAL.



Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan

2023



RAPBN 2023

Peningkatan Produktivitas
untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan

Disusun oleh:

Tim Kementerian Keuangan

Editor:

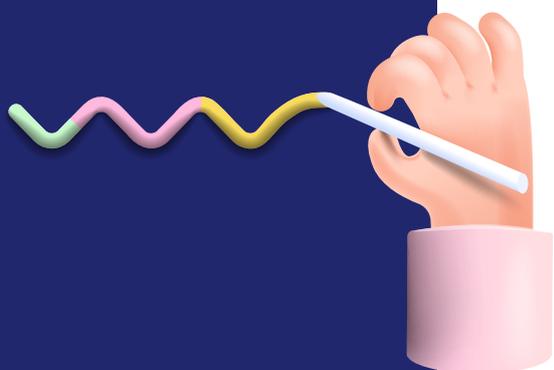
Direktorat Penyusunan APBN

Desain dan Layout

Kandha Aditya Sandjoyo
Reza Ibnu Prakoso

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr Wahidin Raya No.1
www.anggaran.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Anggaran

Disclaimer



**Data yang
digunakan
dalam
buku ini**

2019-2021 : *LKPP Audited*

2022 : *Outlook* APBN

2023 : RAPBN 2023

Apa saja yang ada di RAPBN 2023?



Perekonomian global tahun 2023 berpotensi mengalami stagflasi

akibat tingginya tingkat inflasi dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter serta ancaman terjadinya krisis pangan dan energi.



Kebijakan RAPBN Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas

dengan tetap mengoptimalkan fungsi *shock absorber* dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian.



Pendapatan Negara

ditarget dapat tumbuh, utamanya akan ditopang dari basis penerimaan dalam negeri, dengan memperhatikan harga komoditas yang diperkirakan termoderasi dan terdapat kebijakan penerimaan 2022 yang tidak berulang (a.l PPS).



Kebijakan Belanja Negara

diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi.



Sinergi belanja K/L, TKD dan pembiayaan investasi

akan diperkuat dan disertai kebijakan *automatic adjustment* yang akan dilanjutkan sebagai upaya mitigasi risiko terhadap dampak fluktuasi perekonomian pada APBN



Defisit RAPBN tahun 2023 direncanakan 2,85% PDB

sebagai komitmen menjalankan amanat UU No.2/2020 dengan dukungan sumber pembiayaan anggaran yang lebih efisien dan inovatif termasuk pemanfaatan SAL.

>>>RAPBN2023/Ringkasan

Fokus Kebijakan Fiskal 2023



Penguatan Peran APBN Sesuai Fungsi Dasarnya dan Melanjutkan Konsolidasi Fiskal Berkualitas

Mobilisasi Pendapatan

- Menjaga Efektivitas Implementasi UU HPP
- Penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP
- Mengantisipasi pelemahan ekonomi global dan harga komoditas yang lebih rendah di tahun 2023

Belanja Berkualitas

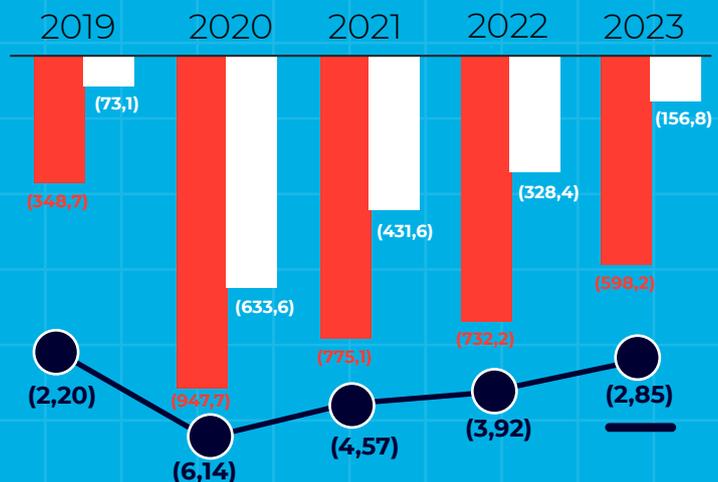
- Efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel
- Fokus untuk *human capital, physical capital, institutional capital, institutional reform*
- Antisipasi ketidakpastian

Pembiayaan Inovatif

- Pengendalian risiko utang
- Meningkatkan peran Swasta, BUMN, BLU, SWF, SMV (Pembiayaan inovatif)

RAPBN 2023 untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

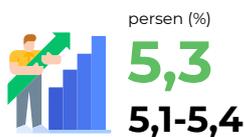
- Defisit (triliun Rupiah)
- Keseimbangan Primer (triliun Rupiah)
- Defisit thd PDB (%)



>>>RAPBN2023/Ringkasan

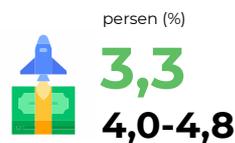
Asumsi Dasar Ekonomi Makro

● 2022 ● 2023



Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat didukung oleh fundamental makro ekonomi yang *robust* serta transformasi ekonomi



Inflasi

Laju inflasi dijaga dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ dengan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dan energi serta intervensi harga



Tingkat Bunga SUN 10 Tahun

Fundamental makro ekonomi yang terjaga baik, serta strategi pembiayaan yang pruden dan kredibel akan terus dilakukan sehingga dapat menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan investor untuk berinvestasi pada pasar domestik



Nilai Tukar

Solidnya fundamental ekonomi domestik dan reformasi struktural yang berkesinambungan serta bauran kebijakan fiskal dan moneter akan menopang stabilitas nilai tukar Rupiah



Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang Rusia-Ukraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi serta keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela



Lifting Minyak

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan diantaranya mendorong percepatan proyek-proyek migas baru, menjaga level produksi lapangan eksisting, serta perbaikan regulasi dan insentif fiskal



Lifting Gas



>>>RAPBN2023/Ringkasan

RAPBN 2023

akan kembali pada defisit dibawah 3% PDB....



Pendapatan Negara
Rp2.443,6 T

Pendapatan negara Rp2.443,6 triliun (tumbuh 0,3% dari *outlook* 2022) terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif



Perpajakan
Rp2.016,9 T

Tumbuh 4,8% dari *outlook* 2022 seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik serta implementasi perpajakan



PNBP
Rp426,3 T

Turun 16,6% dari *outlook* 2022 dipengaruhi oleh normalisasi harga komoditas



Hibah
Rp0,4 T



Belanja Negara
Rp3.041,7 T

Belanja Negara diproyeksikan Rp3.041,7 T (turun 4,0% dari *outlook* 2022) dalam rangka pelaksanaan konsolidasi fiskal



Belanja Pemerintah Pusat
Rp2.230,0 T

Alokasi belanja pemerintah pusat turun 5,9% dari *outlook* 2022 dikarenakan peningkatan kualitas belanja (*spending better*) dan konsolidasi fiskal



Transfer ke Daerah
Rp811,7 T

Alokasi transfer ke daerah meningkat Rp12,6 triliun atau 1,6% dari *outlook* 2022, terutama karena peningkatan DAU



Defisit Anggaran
(Rp598,2 T)



Pembiayaan Anggaran
Rp598,2 T

Pembiayaan utang yang turun sekitar 8,1% terhadap *outlook* 2022

>>>RAPBN2023/Pendapatan Negara

Penerimaan Perpajakan

Tumbuh 4,8%, Penerimaan Perpajakan 2023 diperkirakan Rp2.016,9 T



Baseline Penerimaan Perpajakan tahun 2023 memperhitungkan:

- Pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik
- Implementasi kebijakan perpajakan.
- Moderasi harga komoditas di tahun 2023.
- Kebijakan yang tidak berlanjut di tahun 2023 (a.l PPS, insentif perpajakan PEN, dan flush out CPO).

Kebijakan Perpajakan

- Penguatan pengawasan dan kepatuhan
- Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan
- Menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang HPP.
- Insentif perpajakan yang lebih terarah

tumbuh
6,7%

Penerimaan Pajak

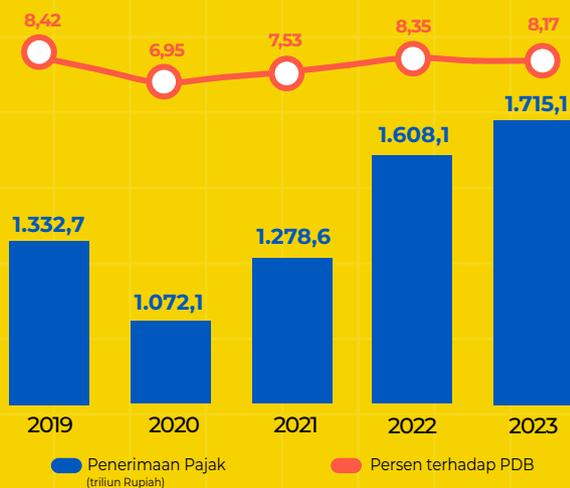
ditopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri

terkontraksi
4,7%

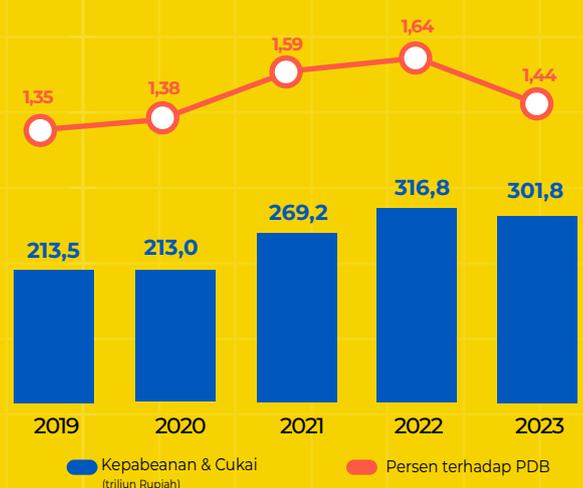
Kepabeanaan & Cukai

karena Bea Keluar yang lebih rendah dipengaruhi moderasi harga komoditas

Penerimaan Pajak



Kepabeanaan & Cukai



>>>RAPBN2023/Pendapatan Negara/Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Pajak

Rp1.715,1
triliun

didukung peningkatan kontribusi PPN sejalan implementasi kebijakan tarif PPN baru dan prospek permintaan dalam negeri yang tetap tumbuh

Dukungan Kebijakan Pajak

Implementasi aturan turunan UU HPP (a.l integrasi data perpajakan).

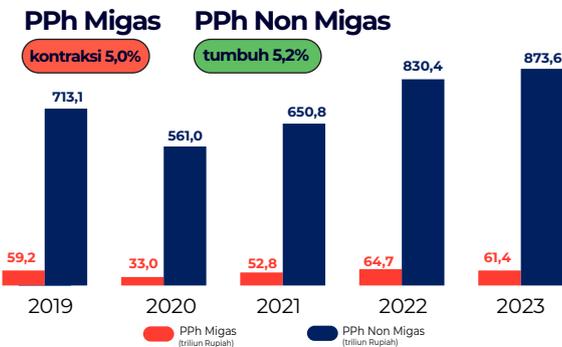
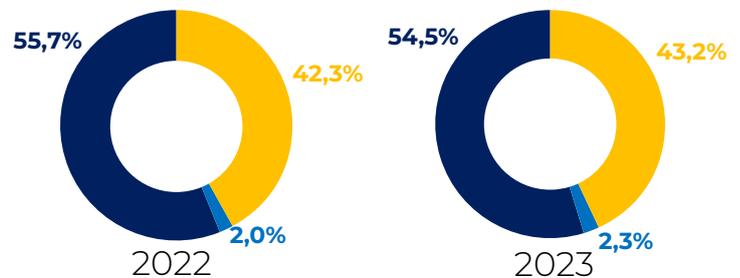
Penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP.

Penguatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, pengawasan, dan penegakan hukum.

Insentif pajak yang terarah dan terukur.

Kontribusi Per Jenis Pajak

■ PPh ■ PPN & PPn BM ■ PBB dan Pajak Lainnya



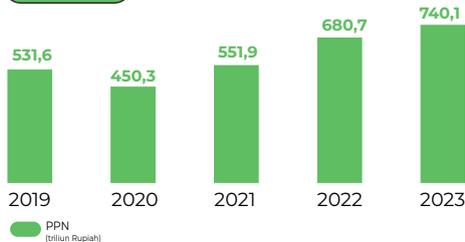
Penerimaan PPh

PPh Migas Rp61,4 T basis harga minyak yang lebih rendah

PPh Non migas Rp873,6 T a.l memperhitungkan keberlanjutan pemulihan ekonomi dan penerimaan tahun 2022 yang tidak berlanjut

PPN

tumbuh 8,7%

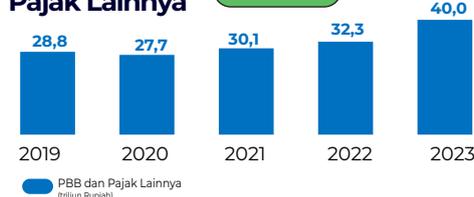


Penerimaan PPN & PPn BM

PPN mencapai Rp740,1 T, dipengaruhi a.l tumbuhnya konsumsi domestik, penerapan penuh tarif PPN baru, dan memperhitungkan penerimaan dari kompensasi energi.

PBB & Pajak Lainnya

tumbuh 23,9%



PBB dan Pajak Lainnya

PBB dan pajak lainnya mencapai Rp40,0 T terutama didukung peningkatan objek pajak PBB-P3.

>>>RAPBN2023/Pendapatan Negara/Penerimaan Perpajakan

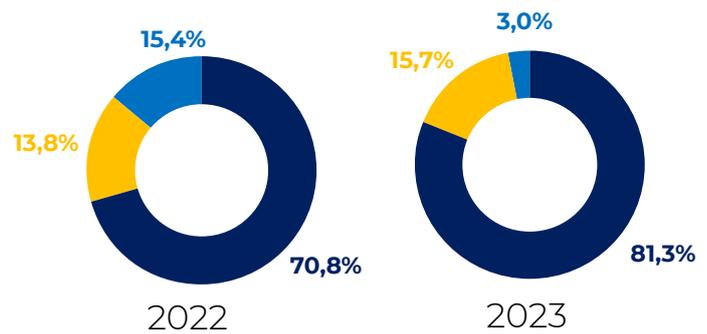
Kepabeanan & Cukai

Rp301,8
triliun

didukung penerimaan Cukai, sementara Kontribusi Bea Keluar menurun mengikuti harga komoditas ekspor utama yang diperkirakan lebih rendah

Kontribusi terhadap total Kepabeanan dan Cukai

■ Cukai ■ Bea Masuk
■ Bea Keluar



Dukungan Kebijakan Kepabeanan & Cukai

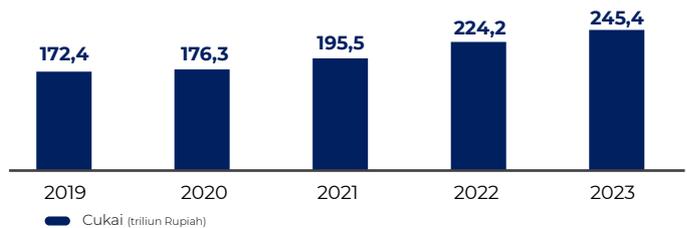
Pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional;

Peningkatan efektivitas pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit)

Optimalisasi kerja sama internasional penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas serta Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Penerimaan Cukai

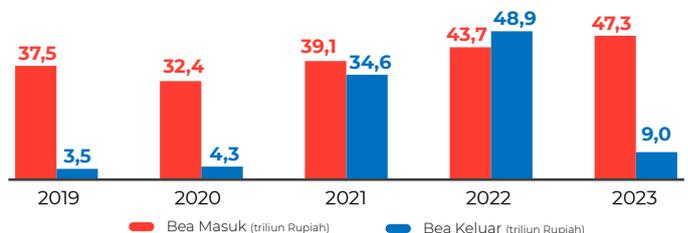
Penerimaan cukai mencapai Rp245,4 T (81,3% total penerimaan BC), tumbuh 9,5% didukung kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai serta penerimaan dari MMEA sejalan membaiknya sektor pariwisata.



Pajak Perdagangan Internasional

Bea Masuk mencapai Rp47,3 T (15,7% total penerimaan BC), meningkat 8,3% dipengaruhi proyeksi kinerja impor yang diperkirakan masih tinggi.

Bea Keluar mencapai Rp9,0 T (3,0% total penerimaan BC), turun 81,6% dipengaruhi harga CPO dan turunnya yang diproyeksikan lebih rendah

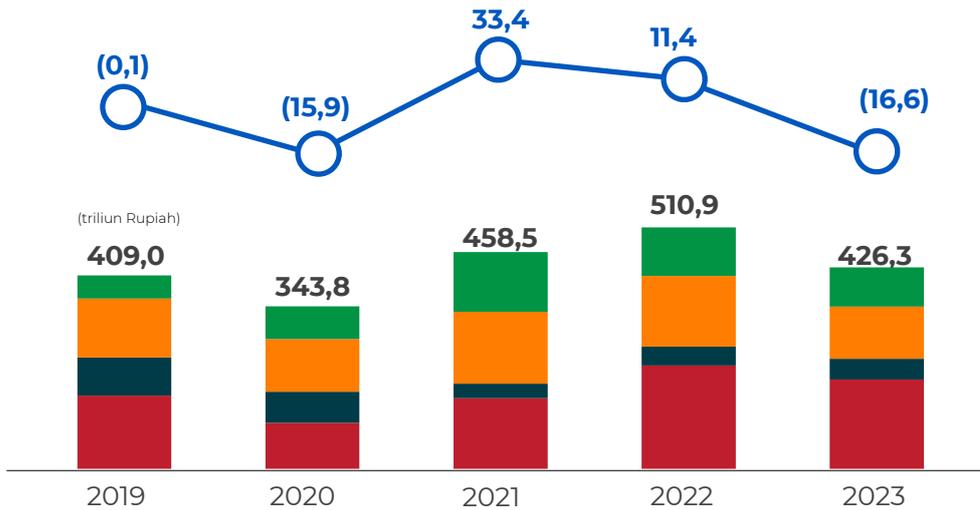


>>>RAPBN2023/Pendapatan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp426,3

triliun



**PNBP
turun 16,6%
dari outlook 2022**

- Pertumbuhan (%)
- Pendapatan BLU
- PNBP Lainnya
- PKND
- Pendapatan SDA



Rp188,7 T

Pendapatan Sumber Daya Alam

Dipengaruhi prospek harga komoditas Migas dan Minerba yang tidak setinggi tahun 2022 dan optimalisasi *lifting* migas



Rp44,1 T

Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan

Optimalisasi KND melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN untuk meningkatkan kinerja BUMN.



Rp110,4 T

Pendapatan PNBP Lainnya

Penjualan Hasil Tambang dan DMO lebih rendah sejalan moderasi harga komoditas minyak dan minerba

Optimalisasi PNBP K/L melalui peningkatan kualitas layanan, pengelolaan aset BMN dan peningkatan sinergi antar instansi terkait.



Rp83,0 T

Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU Sawit sejalan normalisasi harga CPO yang diperkirakan tidak setinggi tahun 2022

Pendapatan BLU layanan didukung oleh perluasan dan simplifikasi layanan serta optimalisasi pemanfaatan kas BLU.

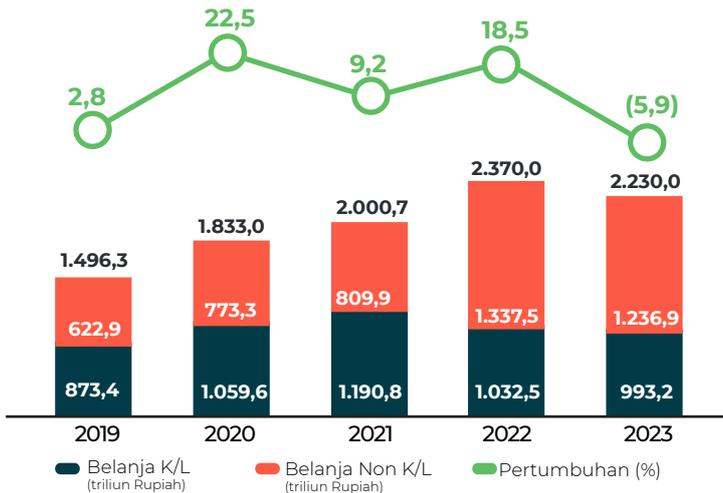
>>>RAPBN2023/Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

Rp2.230,0

triliun

Untuk peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan *fiscal buffer*



Belanja BPP Tahun 2023, menurun dari outlook 2022 dalam rangka konsolidasi fiskal (kembali di bawah 3% dari PDB)

Belanja K/L

Rp993,2 T

- Memenuhi kebutuhan belanja prioritas
- Melanjutkan pembangunan SDM
- Pembangunan Infrastruktur



Belanja Non K/L

Rp1.236,9 T

- Digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian ditengah situasi global saat ini dimana APBN menjalankan perannya sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat

Kebijakan

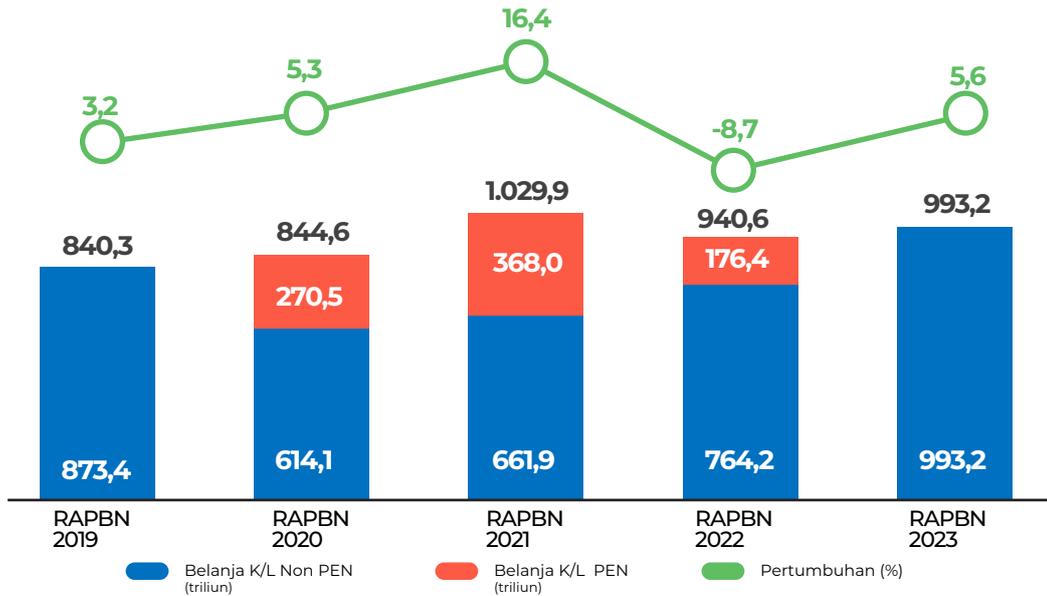
- Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing, melalui:
 - peningkatan kualitas pendidikan
 - transformasi sistem kesehatan
 - akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif
- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi
- Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi
- Meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi
- Melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas
- Meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah
- Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Kementerian/Lembaga

Rp993,2 triliun

mendukung konsolidasi fiskal dengan tetap meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Mendukung pembangunan IKN

Kemenhub, KLHK, Kemen.PUPR, Polri, BKPM

a.l untuk:

- Pembangunan sarana dan prasarana IKN
- Penguatan standar LHK
- Pengamanan IKN
- Pembuatan peta peluang investasi proyek prioritas strategis
- Promosi kegiatan di Kawasan IKN

Mendukung persiapan pemilu

KPU, Bawaslu, Kemendagri, RRI

- Tahapan Pemilu
- Diklat satpolPP untuk pelaksanaan pilkada serentak
- Gerakan cerdas memilih

Mendukung penyelesaian infrastruktur prioritas

KemenPUPR, Kemenhub, KemenESDM, Kemenkominfo, dan Kementan)

antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, bandara, rusun, jalur kereta api, infrastuktur EBTKE, Palapa Ring, dan akses internet di Papua

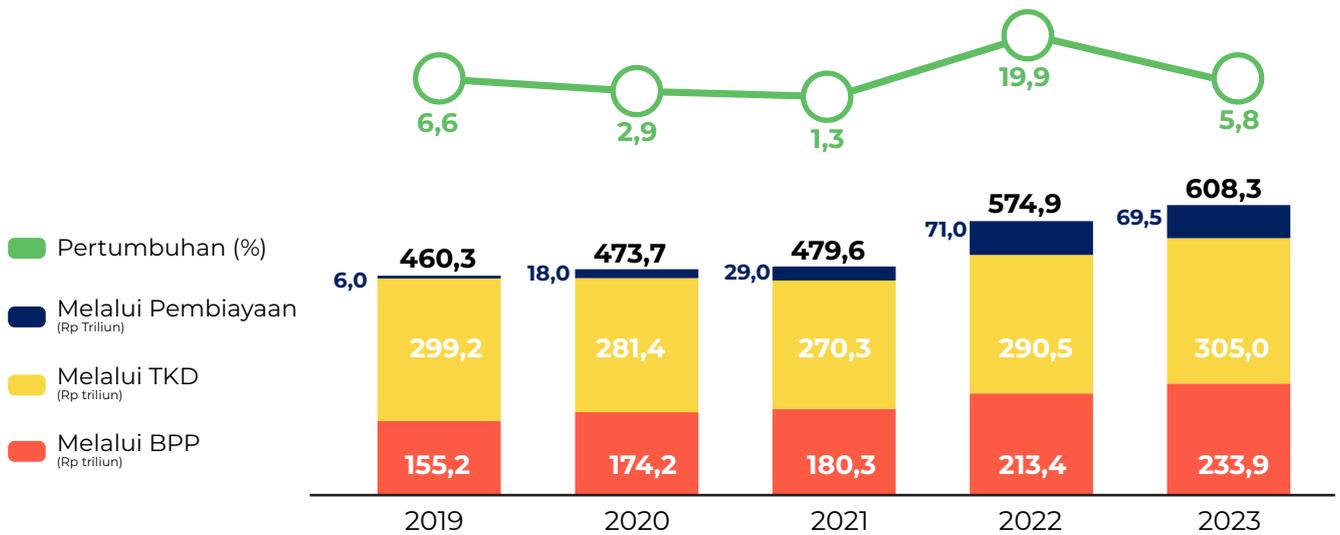
Mendukung pengadaan Alutsista

>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Pendidikan

Rp608,3
triliun

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Anggaran Pendidikan tahun 2023, terdiri dari:

Rp233,9 T

Melalui Belanja Pemerintah Pusat



PIP kepada **20,1 juta siswa**
KIP Kuliah kepada **976,8 ribu mahasiswa**
TPG Non PNS untuk **556,9 ribu guru non PNS**

Rp305,0 T

Melalui Transfer ke Daerah

BOS untuk **44,2 juta siswa**
BOP PAUD untuk **6,1 juta peserta didik**

Rp69,5 T

Melalui Pembiayaan

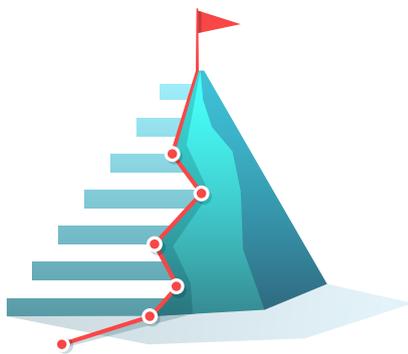
Dana Abadi Pendidikan (termasuk untuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi riset, Dana Abadi Perguruan Tinggi, Dana Abadi Kebudayaan.
Pembiayaan Pendidikan



>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Tantangan Pendidikan Indonesia

- Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan
- Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN
- Indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan negara sejawat (*peer countries*)
- Kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata
- Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal
- Masih tingginya pengangguran lulusan vokasi

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan



- Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan** melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah);
- Pemerataan kualitas pendidikan** melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru;
- Peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)** melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarpras;
- Penguatan link and match dengan pasar kerja** melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut;
- Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes** untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

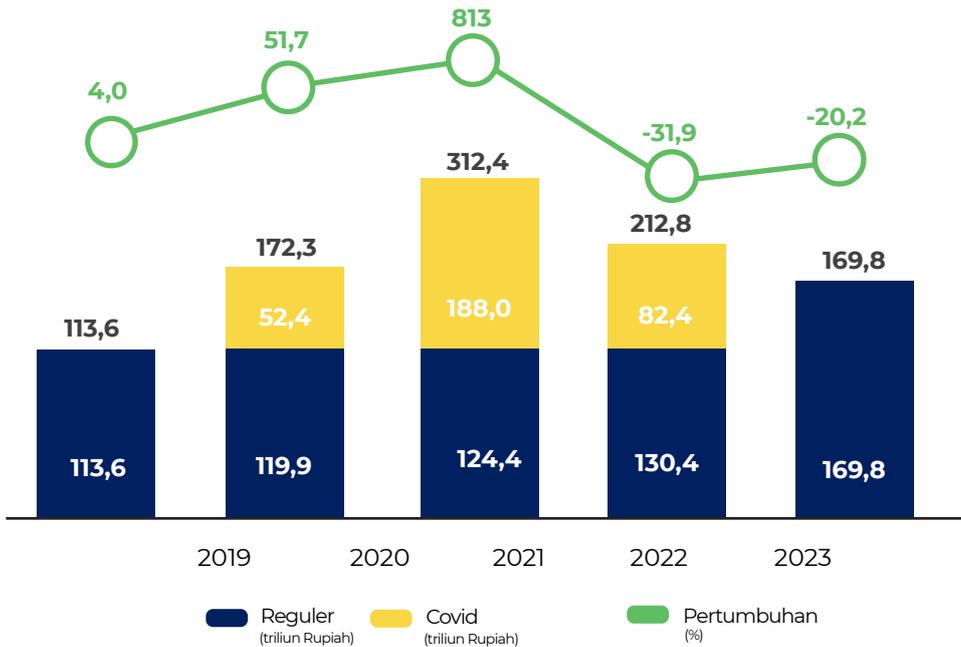
>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Kesehatan

Rp169,8

triliun

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta



Seiring kasus Covid-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi di tahun 2023, **mendorong normalisasi kegiatan termasuk dalam pelayanan kesehatan reguler (non Covid)**

Anggaran Kesehatan 2023 reguler tumbuh 30,2% dibandingkan outlook 2022 reguler, diantaranya untuk transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan *stunting*

Target Output Prioritas



cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak **96,8 juta jiwa**

penyediaan makanan tambahan bagi **55.556 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 138.889 balita kurus**

sosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi **2.000 orang**

penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak **7.377 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 6.177 orang)**

keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan **1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga**

sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak **58.509 sampel**

pembangunan RS Pratama sebanyak **18 RS**

pembangunan/rehabilitasi balai penyuluhan KB sebanyak **1.017 unit**

pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *stunting* **10.280 unit**

penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk **10.260 Puskesmas dan bantuan operasional KB untuk 6.239 balai penyuluhan KB**

>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Kesehatan

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta



Tantangan Kesehatan Indonesia



Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran perlunya perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh di Indonesia



Pemerataan tenaga kesehatan



Kemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan



Mewaspadaai angka prevalensi stunting



Penyakit katastrofik yang masih tinggi,



Mengantisipasi perkembangan varian Covid-19 maupun risiko pandemi di masa mendatang.

Arah Kebijakan Kesehatan Indonesia

+ penguatan layanan kesehatan primer, terutama dalam upaya promotif dan preventif;

+ percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan;

+ peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan;

+ peningkatan layanan kesehatan sekunder, terutama rumah sakit rujukan dan laboratorium;

+ penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi;

+ percepatan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik.

peningkatan manfaat program JKN;



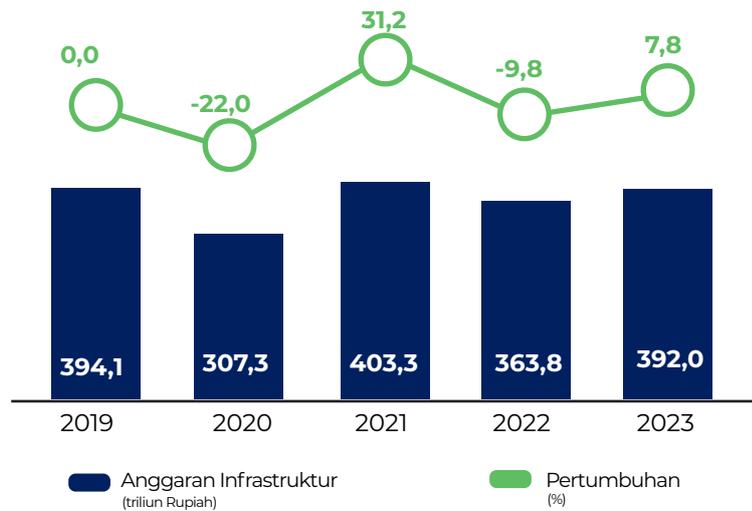
>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Infrastruktur

Rp392,0

triliun

Untuk mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru



Infrastruktur pelayanan dasar

antara lain:



Rumah Susun
3.511 unit dan Rumah
Khusus 3.361 unit



Pembangunan/Rehabilitasi
Sarpras Pendidikan (dasar dan
menengah) 670 unit Sekolah

Infrastruktur konektivitas

antara lain:



Jalan baru 522 km, Jalan Bebas
Hambatan 49 km dan
dukungan JTTS



Jembatan baru 13.684 m



Jalur Kereta Api (kumulatif)
6.627 km'sp



Bandara Baru 6 Lokasi

Infrastruktur energi dan pangan

antara lain:



Pipa Transmisi Gas Bumi
Cirebon-Semarang Tahap I
(Ruas Semarang-Batang)
62,4 km



Jaringan irigasi (baru
dan rehab) 105.600 Ha

Infrastruktur TIK

antara lain:



Penyediaan BTS/Lastmile di 332
lokasi

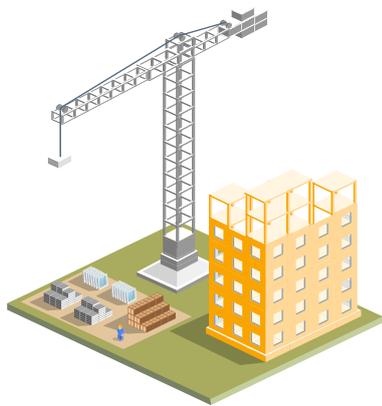


Penyediaan akses internet baru
9.755 lokasi

>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Infrastruktur

Untuk mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru



Tantangan

Pemenuhan layanan dasar, antara lain akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, termasuk air minum dan sanitasi

Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, antara lain belum optimalnya penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT)

Ketersediaan lahan, terutama kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas lainnya

Infrastruktur konektivitas dan transportasi, antara lain belum terselenggaranya jaringan jalan trans pulau yang berkesinambungan, belum optimalnya angkutan barang kereta api, terbatasnya kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan yang masih belum memadai, dan belum optimalnya peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), antara lain belum meratanya penyediaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi, serta perlu optimalisasi layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa

pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi)

mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar

mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung aktivitas ekonomi

meningkatkan sinergitas pendanaan antar pemerintah pusat (K/L dan non K/L) dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan skema pembiayaan KPBU

mendukung penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan

Kebijakan Infrastruktur

>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

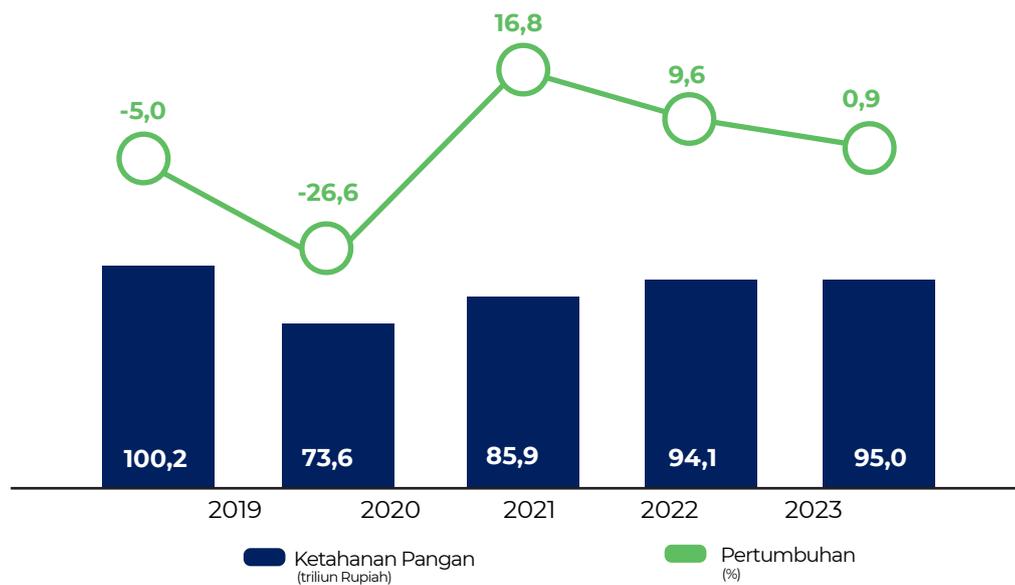
Anggaran

Rp95,0

triliun

Ketahanan Pangan

diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan



Target Output Prioritas

kawasan Padi/Fasilitas Penerapan Budidaya Padi seluas 229.800 Ha; kawasan Jagung/Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung seluas 40.000 Ha; kawasan Kedelai/Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai seluas 150.000 Ha; kawasan Bawang Merah seluas 5.000 Ha

optimalisasi reproduksi sebanyak 4.000.000 akseptor

bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit

pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 6.900 Ha oleh pusat dan 48.564 Ha oleh daerah; rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 Ha oleh pusat dan 111.647 Ha oleh daerah

benih dan calon induk ikan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 118 juta ekor

bantuan sarana chest freezer (peti beku) 300 unit;

pembangunan jalan pertanian 2.589 unit; pembangunan olahan pakan ternak 495 unit

pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 53 pelabuhan perikanan; pembangunan/rehabilitasi 97 unit pembenihan

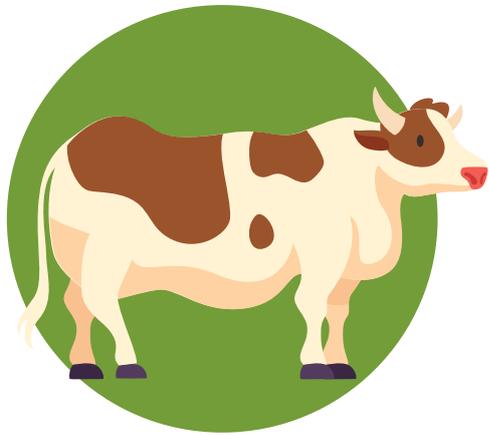
dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.255 kelompok masyarakat

pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 22 unit dan bendungan baru sebanyak 7 unit



Anggaran Ketahanan Pangan

diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan



Tantangan

Tantangan faktor alam yang mengakibatkan turunnya produktivitas seperti kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil berpotensi mengganggu produksi dan rantai pasokan pangan, menyebabkan tingginya harga komoditas dalam negeri dan menimbulkan risiko krisis pangan

Munculnya permasalahan penyakit mulut dan kuku (PMK) membutuhkan perhatian yang serius dan langkah antisipasi untuk menghindari penyebaran skala luas yang akan memberikan dampak kerugian ekonomi

Sektor pertanian dan perikanan juga dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang mengancam ketersediaan pangan masyarakat

Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis

mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan

mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi

memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan

mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk



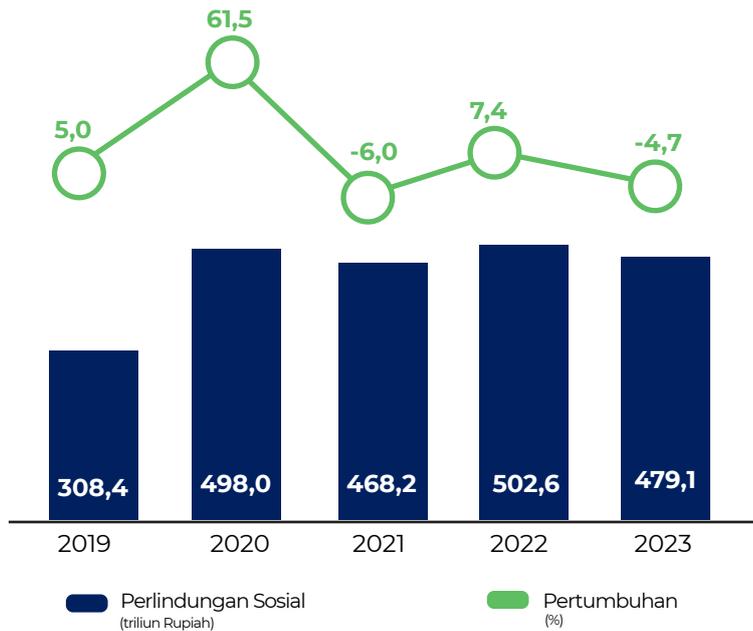
>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Perlindungan Sosial

Rp479,1

triliun

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta



Target Output Prioritas

Pelaksanaan PKH bagi **10 juta KPM**

Program Kartu Sembako bagi **18,8 juta KPM**

Bantuan iuran bagi **96,8 juta peserta PBI JKN**

Kemendikbudristek melalui Program Indonesia Pintar bagi **17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa**

Kementerian Agama melalui Program Indonesia Pintar bagi **2,2 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa**

Tantangan

akurasi data untuk penargetan program yang belum sepenuhnya akurat;

fragmentasi antar program perlinsos yang belum tersinergi dengan baik;

pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur;

masih diperlukan penguatan program guna menghasilkan sistem perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan.

Arah Kebijakan

perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);

penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan;

percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem;

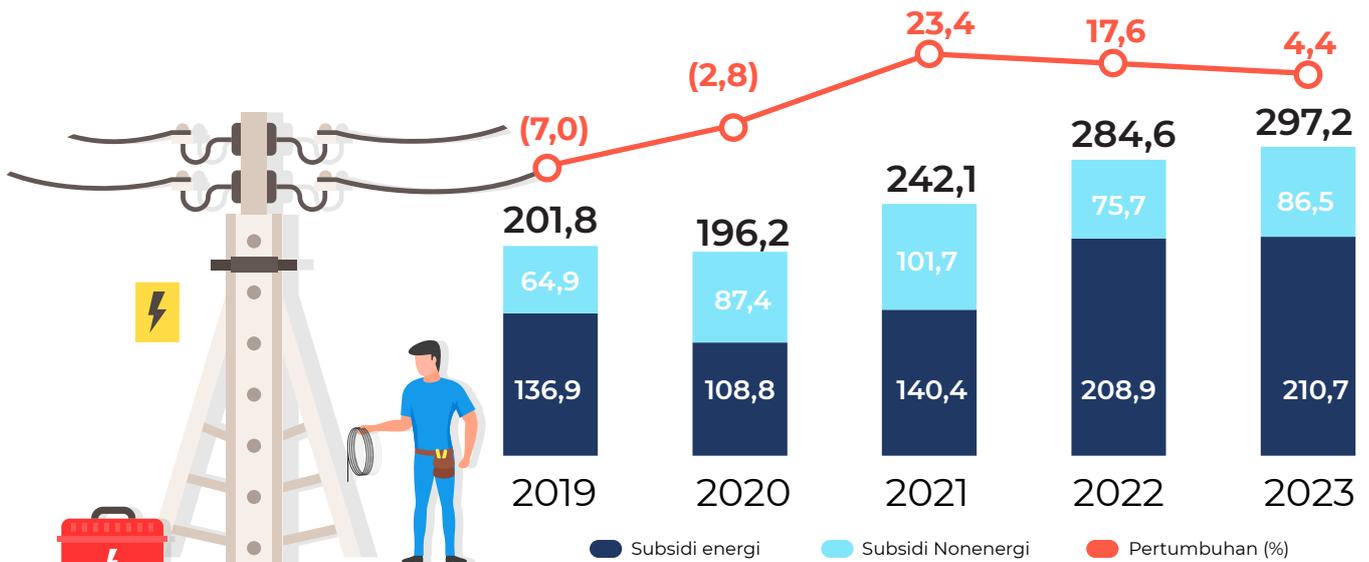
penguatan perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi lansia dan disabilitas;

dukungan pelaksanaan perlinsos yang adaptif terhadap krisis.

>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Subsidi

Diarahkan Untuk Stabilisasi Harga dan Menjaga Daya Beli, serta Mendukung UMKM



Kebijakan Subsidi



Subsidi tetap solar Rp1.000/liter, naik Rp500/liter dari tahun 2022



Mendukung peningkatan pelayanan umum dibidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik



Memberikan subsidi listrik hanya untuk pelanggan yang berhak



Memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR



Pupuk bersubsidi difokuskan pada 2 jenis pupuk (Urea dan NPK) dan 9 jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu)



Insentif perpajakan melalui subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah, sebagai stimulus kepada dunia usaha

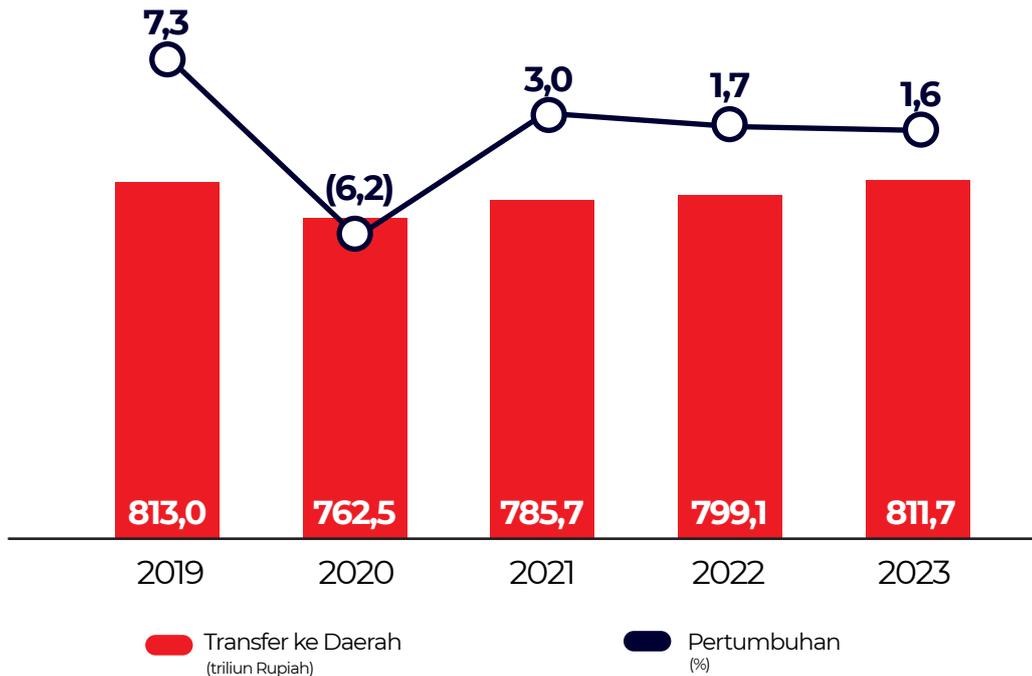
>>>RAPBN2023/Belanja Negara/Belanja Pemerintah Pusat

Transfer ke Daerah

Rp811,7

triliun

diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayan publik di Indonesia



Kebijakan



Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah



Memperkuat kualitas pengelolaan TKD secara terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat



Memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas



Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat



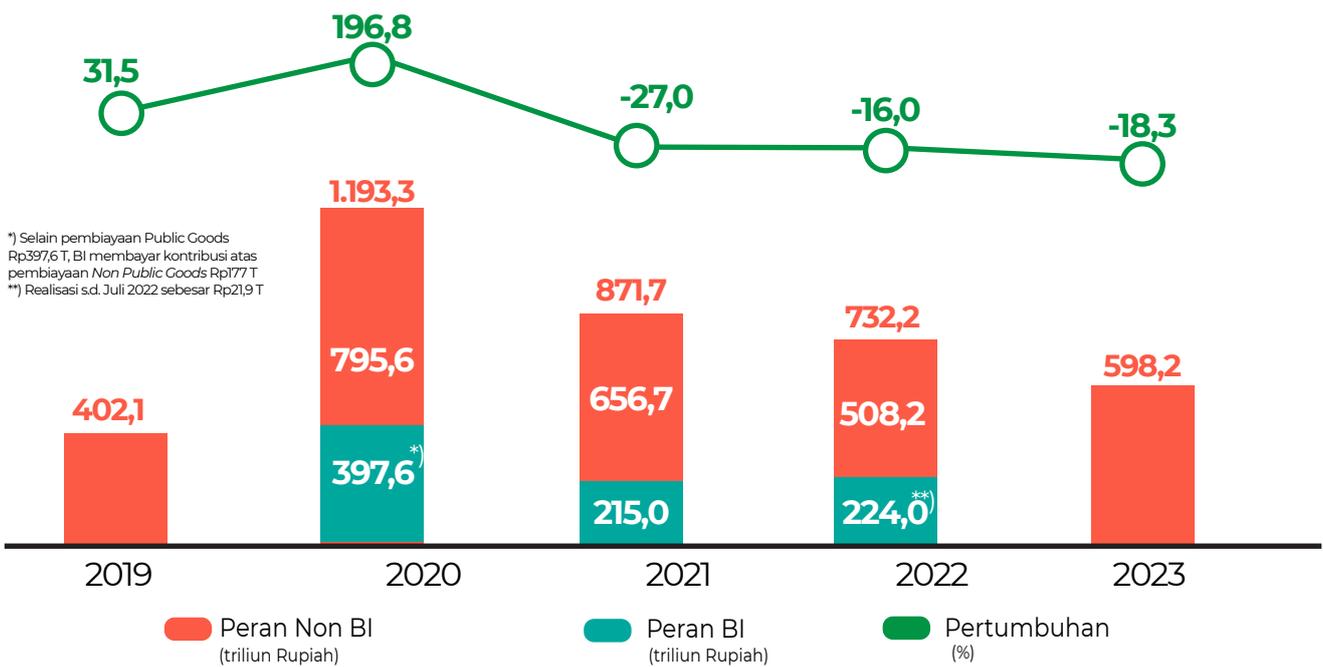
Mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik



Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan

>>RAPBN2023/Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan Anggaran



- Pengelolaan pembiayaan utang yang prudent dan berkelanjutan dengan cara mengendalikan risiko utang pada level yang aman dan kredibel
- Pembiayaan utang melalui pinjaman proyek diarahkan sebagai optimalisasi belanja K/L
- Pemanfaatan pinjaman program secara fleksibel untuk menyediakan *buffer* pembiayaan dan antisipasi ketidakpastian
- Pendalaman pasar SBN domestik & perluasan basis investor menuju kemandirian pembiayaan melalui peningkatan penerbitan SBN ritel
- Pembiayaan investasi kepada BUMN dan BLU untuk pendanaan infrastruktur pusat dan daerah sebagai sinergi atas belanja KL dan TKD
- Pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian
- Pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga cadangan fiskal yang handal dan efisien.



Tantangan Pembiayaan Utang

- Volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global
- Potensi *capital outflow* dari *emerging market*
- Potensi turunnya minat investor
- Potensi kenaikan imbal hasil SBN
- Tidak ada dukungan dari Bank Indonesia

Tantangan Pembiayaan Investasi

- Sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
- Kinerja keuangan BUMN penerima PMN, termasuk hal efisiensi, kurang optimal
- Pembinaan BLU tersebar di berbagai K/L



Kementerian
Keuangan